

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Good governance merupakan pemerintahan yang baik. Tentang bagaimana suatu bangsa mendistribusikan kekuasaan dan mengolah sumber daya dan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Governance melibatkan berbagai pelaku-pelaku yang berkepentingan atau stakeholder yang pada dasarnya terdiri atas pemerintah, pihak swasta dan masyarakat madani. Ketiga pilar tersebut akan menjadi penentu apakah finalisasi kebijakan dapat memberikan arah baru dalam kehidupan publik. Karena tanggung jawab untuk menentukan arah pembangunan di daerah bukan saja tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab semua komponen yang terlibat untuk mewujudkan *good governance*.

Berdasarkan hasil analisis dan temuan serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka pada bab ini peneliti akan membuat suatu kesimpulan serta memberikan saran-saran yang diharapkan mampu mendatangkan manfaat bagi Kantor Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan agar Peranan Pemerintah Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan Dalam Mewujudkan Good Governance dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Adapun hasil dari penelitian ini yang dapat peneliti sajikan antara lain sebagai berikut :

Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik Di Kantor Camat Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan untuk penerapan akuntabilitas atau tanggung jawab pegawai kecamatan Pangkalan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Lesung dalam disiplin waktu masih kurang karena masih adanya pegawai yang telat datang, dan tidak ada diruangan ketika jam pelayanan.

Dari segi responsif pegawai Kecamatan Pangkalan Lesung masih kurang dalam melayani masyarakat dikarenakan pegawai belum menunjukkan sikap ramah.

Dari segi efektivitas dan efisiensi pegawai Kecamatan Pangkalan Lesung masih kurang dalam sumber daya manusia yang kompeten. Dan kurangnya komitmen untuk menetapkan dan melaksanakan srategi dan kebijakan meningkatkan kualitas kinerja dan kualitas pelayanan publik.

Faktor penghambat yang ada pada Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik Di Kantor Camat Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan ialah : Sumber daya manusia (SDM) yang kurang profesional terlihat dari beberapa pegawai yang terkadang tidak ada ditempat ketika masyarakat ingin mengurus keperluannya, masih adanya pegawai yang kurang responsive terhadap masyarakat, hal ini yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan Good Governance.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6.2 Saran

Adapun saran penulis mengenai Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik Di Kantor Camat Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan ialah :

1. Pegawai Kecamatan harus lebih disiplin dan tepat waktu ketika masuk kerja.
2. Camat Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan harus lebih tegas lagi terkait masalah kedisiplinan para pegawainya karena dampak dari ketidak disiplin para pegawai mempengaruhi kualitas pelayanan terhadap masyarakat sehingga dalam pengurusan menjadi lambat.
3. Pegawai kecamatan Pangkalan Lesung diharuskan lebih ramah lagi dalam memberikan pelayanan masyarakat, sehingga masyarakat menjadi puas dan senang mengurus dikantor tersebut.
4. Pegawai Kecamatan harus adil dalam memberikan pelayanan, tidak ada lagi tindakan diskriminasi.